

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Email: marcelinolatuputty@ijrs.or.id



Profil Singkat

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H. atau yang biasa disapa Marcel merupakan lulusan program sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Marcel kemudian menempuh pendidikan magisternya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di jurusan Hukum Transnasional. Sebelum bergabung di IJRS, Marcel pernah menjabat sebagai Staf Perencana Pembangunan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. Marcel juga sudah beberapa kali menjadi tim penyusun dari publikasi terkait Indeks Akses Keadilan maupun Indeks Pembangunan Hukum. Marcel memiliki ketertarikan di isu Hukum dan HAM, Akses terhadap Keadilan, Pembangunan Hukum, Hukum Internasional dan kaitannya dengan kepentingan Indonesia, serta Hukum Laut Internasional dan nasional Indonesia.

Jabatan Saat Ini

Manajer Program untuk Akses terhadap Keadilan & Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (lulus 2016, *cum laude*)
2. S2 Magister Hukum Transnasional UI (lulus 2019, *cum laude*)

Pengalaman Kerja yang Relevan

1. Manajer Program untuk Akses terhadap Keadilan & Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah di IJRS (Juli 2024 - sekarang)
2. Peneliti di IJRS (Nov 2023 – Juli 2024)
3. Konsultan Individu (Juni 2023 – Sep 2023)
4. Staf Perencana Pembangunan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas (Nov 2019 – Mar 2023)
5. Peneliti Junior Centre of Sustainable Ocean Policy (CSOP) FH UI (Agus 2018 – Agus 2019)

6. Peneliti Magang Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FH UI (Nov 2017 – Agus 2019)

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Peneliti di program penyusunan Indeks Pembangunan Hukum 2022, tahun 2023..
2. Peneliti di program penyusunan model pelatihan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan serta penelitian penyusunan anggaran Bantuan Hukum.
3. Peneliti di program penyusunan Roadmap dan RAN OGI serta RPerpres Keterbukaan Pemerintah Indonesia.
4. Peneliti di program penyusunan *Victim Trust Fund*/Dana Bantuan Korban, Tahun 2023.
5. Peneliti di program penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jaksa Tahun 2023.

Hasil Publikasi

Buku

1. Ruhama, Tanti Dian., dkk. (2023). *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: UI Publishing. **(Tim Penyusun)**
2. Ruhama, Tanti Dian., dkk. (2023). *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021*. Jakarta: UI Publishing. **(Tim Penyusun)**
3. Ruhama, Tanti Dian., dkk. (2021). *Indeks Pembangunan Hukum 2020*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. **(Tim Penyusun)**
4. Afriansyah, Arie., dkk. (2018) Buku Saku HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. **(Tim Penyusun)**
5. Afriansyah, Arie., dkk. (2018). Pengaturan Pemindahan Narapidana Lintas Negara dan Urgensinya bagi Indonesia. Depok: LPHI FH UI. **(Tim Penyusun)**

Laporan Penelitian

1. Jones, K., Visser, D., Prasetya, J., Nuriyati, D. (2019). *Fish for Export: Employment in the Wild Capture Seafood Industry in Indonesia*. British Academy Tackling Slavery, Human Trafficking and Child Labour in Modern Business final report. **(Tim Penyusun)**

Artikel Jurnal

1. Latuputty, Marcelino H. (2019). *Indonesia's Obligation to Protect Archaeological and Historical Objects Found at Sea based on 1982 UNCLOS*. Indonesian Journal of International Law (IJIL) Vol 16, No. 4. Pp. 429-451.
2. Luhulima, Hendro Valence dan Marcelino H. Latuputty. (2017). Urgensi Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jurnal Ilmiah PATITA – BPPAUD dan Dikmas Maluku Vol. 5, Ed. 1. Halaman 41-52.

Narasumber dan Moderator:

1. Menjadi Narasumber pada Bimbingan Teknis Pelaksanaan Partisipasi Publik (*e-partisipasi*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 25 Agustus 2022.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4672:bimtek-pelaksanaan-e-partisipasi-dalam-pembentukan-puu&catid=268&Itemid=73&lang=en

2. Menjadi Narasumber Penanggap terhadap Kajian Awal dan Kertas Kerja Kebijakan Komnas Perempuan mengenai Femisida, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, tanggal 25 November 2021.
<https://webbaru.komnasperempuan.go.id/sambutan-ketua-detail/kata-sambutan-ketua-komnas-perempuan-peluncuran-kajian-awal-dan-kertas-kebijakan-femisida-jakarta-25-november-2021>.
3. Menjadi Narasumber Penanggap terhadap Penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM mengenai Pembela HAM, diselenggarakan oleh Komnas HAM, tanggal 12 November 2021.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/6/21/1823/publik-mengapresiasi-penyusunan-snp-pembela-ham.html>.
4. Menjadi Speaker pada *the 9th CILS International Conference on Culture and International Law*, diselenggarakan di FH Universitas Brawijaya Malang, tanggal 2-3 Oktober 2018.
5. Menjadi Moderator FGD tentang Peran Sekretariat Bersama RANHAM dalam Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2021-2025, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, tanggal 13 Juli dan 26 Oktober 2021.
6. Menjadi Moderator Diskusi Publik dan FGD dalam Pembahasan dan Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 bidang Hukum, diselenggarakan oleh AIPJ2 dan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, di Makassar tanggal 4 Agustus 2022 dan di Ambon tanggal 20-21 Oktober 2023.

Pelatihan yang Pernah Diikuti

1. Pelatihan Metodologi Foresight dalam rangka Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 bidang Hukum dan Regulasi, diselenggarakan oleh Nalar Institute – Yanuar Nugroho, tanggal 20-22 Februari 2023.
2. Pelatihan *Economics Analysis of Law (EAL)* Lingkup Hukum dan Regulasi: Mendorong Agenda Pembangunan Nasional yang Bermakna dan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh AIPJ2 dan IKAL Strategis Centre, tanggal 29-30 September 2022
3. Capacity Building on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups, held by BNPT and UNODC, on November 11-13, 2022.
4. Pelatihan Perlindungan Data Pribadi untuk Kementerian/Lembaga: “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh ELSAM dan AIPJ2, tanggal 11-12 Desember 2019.
5. Pelatihan Dasar Hak-Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM dan Demokrasi FH UAJY, tanggal 27 Juni 2013.